

TRANSFORMASI KAMPUNG PANCASILA: PENDAMPINGAN DIGITALISASI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA NONGKODONO

Muhamad Fajar Pramono^{1*}, Aziz Musthafa², Dian Afif Arifah³, Aldy Alfajri²

¹Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Humaniora, Universitas Darussalam Gontor

²Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Darussalam Gontor

³Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja,

Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Darussalam Gontor

Email: mfpramono@unida.gontor.ac.id¹

Abstract. *This community service initiative intends to improve the digital governance performance of Nongkodono Village, the first Kampung Pancasila in Ponorogo, East Java. While Kampung Pancasila programs in Indonesia frequently emphasize symbolic and formalistic approaches, this project aims to provide a functional, quantifiable, and progressive framework in line with Nongkodono's 2022 Medium-Term Village Development Plan (RPJMDes). The first-year program aims to improve village governance by implementing digital solutions, including the Smart Government system. This system was developed by integrating online administrative services based on citizen data with digital asset management to facilitate reporting to local government. This effort was carried out through collaboration with stakeholders, comparative studies with similar communities, and extensive training sessions. The results include the development of a functional Smart Government application and skill capacity improvement among village officials to use digital technologies for governance. Beyond immediate efficiency gains, this effort aims to promote widespread adoption of digital government in rural areas, establishing a national standard for Kampung Pancasila. The Smart Government digital system becomes the main output in this program. The results of this program are also published in the mass media, online news, and accredited scientific journals to broaden insight into Pancasila's values and the potential of a digital revolution in empowering society.*

Keywords: *Smart Government, Kampung Pancasila, Digital Development, Ponorogo Regency*

Abstrak. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan Desa Nongkodono melalui penerapan sistem digital. Sebagai Kampung Pancasila pertama di Ponorogo, Jawa Timur, program ini tidak hanya berfokus pada simbolisme tetapi juga mengembangkan pendekatan yang lebih fungsional, terukur, dan progresif sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2022. Pada tahun pertama, program ini memprioritaskan penerapan sistem *Smart Government* yang dirancang untuk mengintegrasikan layanan administrasi berbasis data warga dan manajemen aset digital, guna meningkatkan efisiensi pelaporan dan pelayanan desa. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, studi banding dengan desa lain yang telah menerapkan konsep serupa, serta pelatihan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam memanfaatkan teknologi digital. Hasil yang dicapai meliputi pengembangan aplikasi *Smart Government* yang fungsional dan peningkatan keterampilan aparatur desa. Program ini juga diharapkan mendorong penerapan luas sistem pemerintahan digital di desa-desa lain, sekaligus memperkuat nilai-nilai Pancasila melalui tata kelola yang inovatif. Publikasi hasil program dilakukan melalui media massa, berita daring, dan jurnal ilmiah untuk memperluas wawasan tentang pentingnya transformasi digital dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pemerintahan desa.

Kata kunci: *Smart Government, Kampung Pancasila, Digital Development, Kabupaten Ponorogo*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital yang pesat telah mengubah praktik pemerintahan di seluruh dunia dengan menyediakan alat untuk meningkatkan efisiensi administrasi, kualitas layanan, dan partisipasi publik. Namun, wilayah

pedesaan, khususnya di negara berkembang, sering menghadapi kesulitan dalam mengadopsi inovasi ini akibat keterbatasan infrastruktur, kurangnya keahlian teknis, dan keterbatasan anggaran (World Bank, 2016). Di Indonesia, pemerintahan desa memegang peran penting

dalam melaksanakan strategi pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-undang RI, 2014), yang menekankan otonomi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Meski demikian, banyak desa masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan tata kelola yang efisien akibat sistem manual tradisional yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan (Rahman, Hapsari, & Pameli, 2024; Salistia, Riyanto, Junaedi, & Amalia, 2023).

Desa Nongkodono, yang terletak di Ponorogo, Jawa Timur, merupakan salah satu desa yang memiliki kekayaan budaya dan sosial yang kuat. Sebagai Kampung Pancasila pertama di wilayah tersebut, Desa Nongkodono menjadi simbol upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Secara geografis, desa ini memiliki lanskap pedesaan yang khas, dengan area pemukiman yang dikelilingi oleh lahan pertanian (Lestari, 2023). Kehidupan masyarakatnya sebagian besar bergantung pada sektor agraris dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Kegiatan sehari-hari masyarakat di desa ini mencerminkan nilai-nilai gotong royong yang kuat, meskipun tantangan modernisasi dan digitalisasi mulai dirasakan (Haris & Sigit, 2023).

Kondisi awal di Desa Nongkodono menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan desa masih dilakukan secara manual dengan keterbatasan teknologi digital. Proses administrasi seperti pengelolaan data warga, pengurusan dokumen, dan pelaporan keuangan seringkali memakan waktu lama dan rawan kesalahan. Selain itu, kapasitas teknis aparat desa dalam menggunakan teknologi digital relatif rendah, sehingga menghambat upaya modernisasi tata kelola. Analisis situasi di lapangan juga mengungkapkan bahwa masyarakat dan perangkat desa membutuhkan pelatihan intensif untuk meningkatkan literasi digital, khususnya dalam memanfaatkan teknologi untuk layanan publik yang lebih efisien. Keterbatasan ini, jika tidak segera diatasi, berpotensi menghambat implementasi program pembangunan yang lebih besar sesuai dengan RPJMDes (Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa) Nongkodono tahun 2022 (Jatim Prov, 2022).

Sementara Desa Nongkodono memiliki potensi besar sebagai model Kampung Pancasila, inisiatif awal di desa ini lebih bersifat simbolis dan formalitas, sehingga dampak pada tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat masih terbatas (Nugroho, 2016). Untuk mengatasi hal ini, RPJMDes Nongkodono tahun 2022 menekankan pentingnya adopsi teknologi digital untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, termasuk melalui pelayanan administrasi yang lebih cepat, efisien, dan transparan (Jatim Prov, 2022).

Program pengabdian masyarakat ini dirancang untuk mengatasi tantangan tersebut dengan memperkenalkan sistem *Smart Government*. Sistem ini dirancang untuk mendigitalkan proses utama pemerintahan desa seperti layanan administrasi online, manajemen data warga, dan pelacakan aset digital. Pendekatan ini terinspirasi dari keberhasilan berbagai program digitalisasi di daerah lain (Aprillianto et al., 2022; Arifah & Dhiya'Syaifullah, 2024; Dwimahendrawan, Rohim, & others, 2024), terutama di Desa Krandegan, Jawa Tengah, sebagai mitra percontohan pada program ini dan telah diakui secara nasional. Di Desa Nongkodono, program ini diadaptasi agar sesuai dengan kebutuhan lokal, dengan mempertimbangkan sumber daya dan karakteristik masyarakat setempat.

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas teknis aparat desa, meningkatkan kualitas layanan publik, serta menciptakan model tata kelola digital yang dapat direplikasi di desa-desa lain. Pada tahun pertama ini, target utama dari program ini adalah mengembangkan sistem berbasis website yang memungkinkan publik mendapatkan gambaran lebih rinci tentang Desa Nongkodono, termasuk kehidupan masyarakatnya, dapat diilustrasikan dengan foto lokasi, seperti gambar kantor desa, pusat kegiatan masyarakat, dan fasilitas umum yang ada.

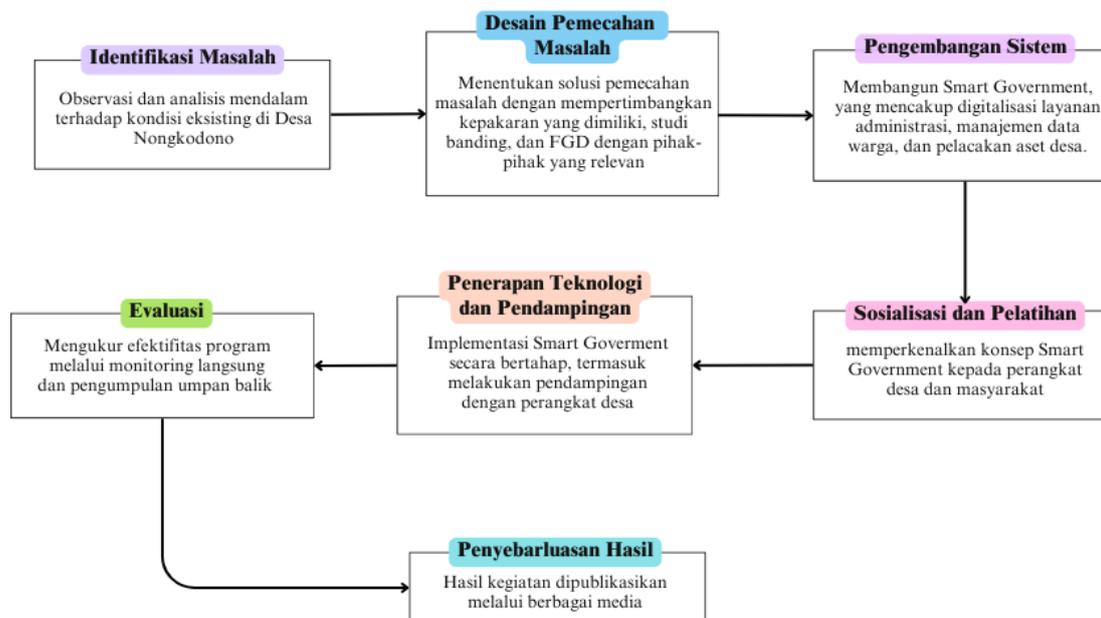
METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pendampingan peningkatan kinerja pemerintahan Desa Nongkodono berbasis

digital dalam rangka pengembangan Kampung Pancasila dilaksanakan selama tahun pertama dari rencana tiga tahun, yaitu pada bulan Januari hingga Desember 2024. Lokasi kegiatan berada di Desa Nongkodono, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dengan dukungan perangkat desa setempat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Karang Taruna.

Kegiatan ini memanfaatkan beberapa alat dan bahan pendukung, di antaranya laptop,

printer, aplikasi layanan surat online, data administrasi online, dan jaringan internet untuk operasionalisasi teknologi berbasis digital. Mitra dari Desa Krandegan, Purworejo, Jawa Tengah, yang sudah berhasil menerapkan sistem digital, juga dilibatkan sebagai narasumber dan konsultan. Proses pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam beberapa tahapan yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Tahap Kegiatan pada Program Pengabdian Masyarakat

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui kondisi awal mitra, melalui wawancara dan diskusi kelompok terarah (*focus group discussions*, FGD) dengan perangkat desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Karang Taruna.

2. Desain Pemecahan Masalah

Berdasarkan hasil analisis, solusi dirancang dalam bentuk sistem *Smart Government*, yang mencakup digitalisasi layanan administrasi, manajemen data warga, dan pelacakan aset desa. Desain solusi ini disesuaikan dengan konteks lokal dan potensi sumber daya yang tersedia, mengacu pada model sukses di Desa Krandegan, Jawa Tengah, sebagai referensi Desa Percontohan.

3. Sosialisasi dan Pelatihan

Sosialisasi dilakukan untuk memperkenalkan konsep *Smart Government* kepada perangkat

desa dan masyarakat, guna membangun pemahaman dan dukungan terhadap program. Pelatihan teknis diberikan kepada perangkat desa untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan aplikasi *Smart Government*. Materi pelatihan mencakup pengoperasian aplikasi, manajemen data, serta perawatan perangkat keras dan lunak yang digunakan.

4. Penerapan Teknologi dan Pendampingan

Sistem *Smart Government* diimplementasikan secara bertahap, dimulai dengan pengadaan perangkat teknologi, seperti komputer, printer, dan perangkat lunak aplikasi. Sistem ini dirancang untuk menyediakan layanan administrasi online, termasuk pembuatan surat, manajemen data penduduk, dan pelaporan aset desa. Tim Pengabdian juga melakukan pendampingan intensif kepada perangkat desa selama proses

implementasi untuk memastikan penggunaan sistem berjalan sesuai rencana.

5. **Evaluasi**

Evaluasi dilakukan secara berkala melalui monitoring langsung dan pengumpulan umpan balik dari perangkat desa dan masyarakat untuk memperbaiki sistem dan menilai dampak program.

6. **Penyebarluasan Hasil**

Hasil kegiatan dipublikasikan melalui berbagai media, termasuk artikel jurnal, video dokumentasi, dan publikasi online, untuk memperluas dampak program. Rencana keberlanjutan mencakup peningkatan fitur aplikasi di tahun-tahun berikutnya, seperti *Smart Environment* dan *Smart Economic*, serta kolaborasi lebih lanjut dengan perguruan tinggi dan mitra strategis lainnya.

Setiap tahap pada kegiatan ini dirancang untuk memastikan bahwa program tidak hanya menghasilkan output yang fungsional tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dan berkelanjutan bagi pemerintahan dan masyarakat Desa Nongkodono.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Nongkodono menghasilkan sejumlah capaian yang mendukung peningkatan kinerja pemerintahan berbasis digital, sesuai dengan tujuan program yang diidentifikasi dalam RPJMDes 2022. Program tahun pertama ini difokuskan pada implementasi sistem *Smart Government*, yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pemerintahan desa.

1. **Implementasi dan Efektifitas Sistem Smart Government**

Penerapan aplikasi layanan surat dan administrasi online menunjukkan efektifitas yang nyata. Data survei mengungkapkan bahwa 85% masyarakat merasa lebih mudah mengakses layanan administrasi setelah sistem ini diterapkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan pada implementasi teknologi digital di Desa Krandegan, yang menunjukkan peningkatan efisiensi waktu dan kualitas layanan dengan sistem serupa.



Gambar 2. Studi Banding ke Desa Krandegan, Purworejo, Jawa Tengah

Pendekatan di Desa Nongkodono memiliki nilai tambah melalui pelibatan aktif masyarakat dan mitra desa dalam proses perencanaan dan implementasi teknologi, sehingga memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap sistem ini.

Keberhasilan ini juga memperlihatkan bahwa teknologi digital dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan pelayanan administrasi manual, seperti proses yang lambat,

ketergantungan pada dokumen fisik, dan tingginya biaya operasional. Dengan penghematan waktu hingga 30%, program ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga mendorong transparansi pelayanan, yang menjadi salah satu tujuan utama reformasi birokrasi di tingkat desa.

2. **Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa**

Pelatihan intensif kepada perangkat desa memberikan dampak signifikan terhadap

kemampuan teknis mereka dalam mengoperasikan aplikasi digital. Hasil evaluasi pasca-pelatihan menunjukkan bahwa 90% peserta pelatihan mampu mengoperasikan aplikasi secara mandiri, termasuk dalam membuat dan memproses

dokumen digital. Kondisi ini membuktikan bahwa transfer pengetahuan yang dilakukan dalam kegiatan ini berhasil, didukung oleh metode pelatihan berbasis praktik dan pendampingan langsung dari konsultan Desa Krandegan.



Gambar 3. Dokumentasi Sosialisasi Pelatihan Penggunaan Sistem



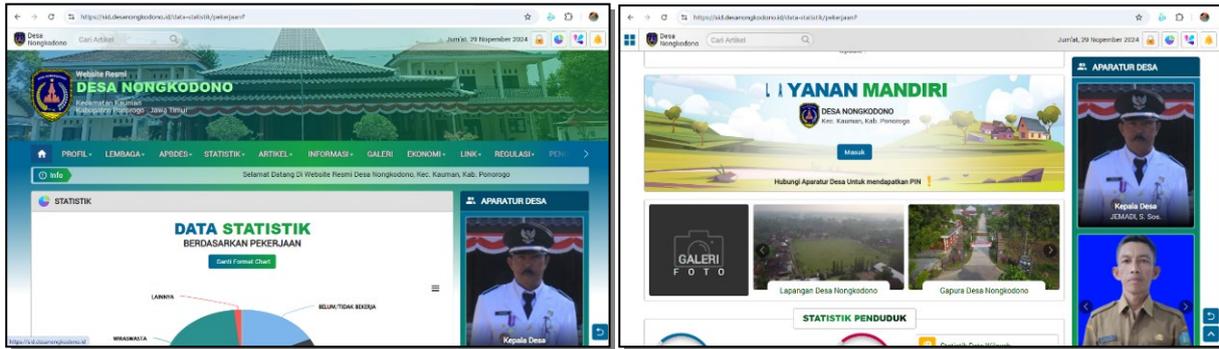
Gambar 4. Mitra dan Perangkat Desa Nongkodono

Aspek ini menyoroti pentingnya pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam keberhasilan program digitalisasi desa. Sebagaimana dikemukakan oleh studi sebelumnya, teknologi hanya akan optimal jika didukung oleh kesiapan pengguna. Oleh karena itu, pendekatan berkelanjutan dalam peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan dan evaluasi berkala menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan program ini.

3. Peningkatan Efisiensi Layanan Publik

Setelah implementasi sistem *Smart Government* yang dapat diakses pada [https://sid.desanongkodono.id/data-](https://sid.desanongkodono.id/data-
statistik/pekerjaan#)

[statistik/pekerjaan#](https://sid.desanongkodono.id/data-statistik/pekerjaan#) yang dikembangkan agar layanan administrasi desa menjadi lebih cepat dan efisien. Partisipasi aktif masyarakat, terutama Karang Taruna dan BUMDes, memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan program ini. Selain membantu dalam pengumpulan data untuk aplikasi, kelompok ini juga menjadi penghubung antara perangkat desa dan masyarakat dalam proses sosialisasi dan implementasi teknologi. Model kolaborasi ini memperlihatkan bagaimana pendekatan berbasis partisipasi dapat memperkuat penerimaan dan keberlanjutan program di tingkat masyarakat.



Gambar 5. Tampilan Web Sistem *Smart Government* Desa Nongkodono

Berdasarkan data waktu pemrosesan dokumen, terdapat pengurangan waktu layanan hingga 40% dibandingkan metode manual sebelumnya. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Diatasmann dkk. (Ditasman & Amrullah, 2024), yang menunjukkan bahwa digitalisasi layanan pemerintahan dapat mempercepat proses pelayanan hingga 30-50%.

Selain itu, keterlibatan Desa Krandegan sebagai mitra memberikan nilai tambah berupa transfer pengalaman dari desa yang telah lebih dulu menerapkan digitalisasi pemerintahan. Pendekatan ini memperlihatkan pentingnya studi tiru dalam pengembangan teknologi baru, terutama untuk meminimalkan kesalahan dan mempercepat adopsi teknologi di desa mitra.

4. Dampak pada Citra Kampung Pancasila

Implementasi teknologi *Smart Government* tidak hanya meningkatkan kinerja pemerintahan, tetapi juga memperkuat citra Desa Nongkodono sebagai Kampung Pancasila yang lebih modern dan fungsional. Dengan sistem digital yang transparan dan efisien, desa ini menunjukkan komitmennya dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara konkret, khususnya pada aspek keadilan sosial dan kemajuan bersama. Hal ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Ponorogo dan sekitarnya untuk melakukan hal serupa.

5. Hubungan dengan Program Serupa

Program ini mengambil inspirasi dari keberhasilan digitalisasi di berbagai daerah lain (Arifah & Dhiya'Syaifullah, 2024; Manalu, Rahayu, & Rahayu, 2024; Rahmayanti & Hamdani, 2023), terutama di Desa Krandegan, Jawa Tengah sebagai desa mitra percontohan dalam program ini dan telah diakui secara nasional. Dengan adaptasi sesuai konteks lokal, Desa Nongkodono kini memiliki potensi untuk menjadi model Kampung Pancasila berbasis digital di wilayah Jawa Timur. Keberhasilan ini mendukung argumen bahwa pengembangan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan desa.

6. Penyebarluasan dan Dokumentasi Hasil

Hasil program ini telah dipublikasikan melalui media daring, video dokumentasi, dan direncanakan untuk publikasi jurnal ilmiah nasional. Salah satu dokumentasi dalam bentuk ideo dapat diakses melalui chanel youtub dengan link berikut: <https://youtu.be/Uj7Ahj7drYY> . Selain itu, publikasi kegiatan pada media masa online, antara lain cakrawala.com, Nusantara News, Halilinter News, Portal Indonesia dan beberapa media lainnya (Cakrawarta.com, 2024; Indonesia, 2024; Nusantara News, 2024), sebagaimana ditunjukkan pada dokumentasi berikut.



Gambar 6. Publikasi pada beberapa Media Massa: (a) Mitra Negara News, (b) Nusantra News, dan (c) Halilinter News

Hal ini bertujuan untuk memperluas wawasan tentang pentingnya transformasi digital dalam tata kelola desa serta membangun model yang dapat direplikasi oleh desa-desa lain.

7. Tantangan dan Evaluasi Program

Meskipun program ini menunjukkan hasil yang positif, beberapa tantangan tetap dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur internet di beberapa wilayah desa dan resistensi awal dari beberapa perangkat desa yang kurang terbiasa dengan teknologi. Namun, tantangan ini berhasil diatasi melalui pendekatan partisipatif dan pendampingan intensif.

Keberhasilan program ini menegaskan bahwa transformasi digital di tingkat desa

memerlukan pendekatan yang holistik, mencakup peningkatan kapasitas manusia, pembangunan infrastruktur, dan penguatan partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan studi-studi terdahulu yang menunjukkan bahwa keberlanjutan program digital di pedesaan sangat bergantung pada kesiapan masyarakat dan dukungan sistemik dari berbagai pemangku kepentingan.

Kesimpulan awal menunjukkan bahwa implementasi sistem *Smart Government* di Desa Nongkodono tidak hanya meningkatkan kinerja pemerintahan desa tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya transformasi digital untuk mendukung penguatan nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola desa. Program ini memiliki potensi keberlanjutan yang kuat, dengan rencana

pengembangan fitur tambahan pada tahun-tahun berikutnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pendampingan peningkatan kinerja pemerintahan Desa Nongkodono berbasis digital dalam rangka pengembangan Kampung Pancasila berhasil mencapai tujuan utama, yaitu mendukung transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa. Hasil yang diperoleh mencakup:

1. Pengembangan aplikasi *Smart Government* yang efektif dalam meningkatkan efisiensi layanan administrasi, dengan penghematan waktu hingga 30% dan pengurangan biaya operasional.
2. Peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan intensif, yang menghasilkan kemampuan mandiri dalam mengoperasikan sistem layanan berbasis digital.
3. Partisipasi aktif masyarakat dan mitra, yang memperkuat rasa kepemilikan terhadap sistem yang diterapkan, sehingga mendukung keberlanjutan program.
4. Dampak positif terhadap citra Desa Nongkodono sebagai Kampung Pancasila yang lebih fungsional dan modern, mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila secara nyata.

Meskipun menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur internet dan resistensi awal terhadap perubahan, pendekatan kolaboratif, serta pendampingan yang intensif, terbukti efektif dalam mengatasi hambatan tersebut. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan desa dapat menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pembangunan berbasis teknologi di pedesaan.

Desa perlu melanjutkan pengembangan dan perawatan aplikasi *Smart Government* agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penting untuk menjaga komitmen dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan konsultan, guna mendukung keberlanjutan transformasi digital.

Dengan langkah-langkah ini, keberhasilan program dapat terus ditingkatkan dan

memberikan dampak yang lebih luas, tidak hanya di Desa Nongkodono tetapi juga di desa-desa lain yang memiliki potensi serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillianto, B., Maharani, B., Sayekti, Y., Irmadariyani, R., Purnamawati, I. I., & Sulistiyo, A. B. (2022). Menuju Tata Kelola Bumdes Yang Baik Melalui Digitalisasi Dan Konsolidasi Laporan Keuangan. *Jurnal Abdi Panca Marga*, 3(2), 55–60.
- Arifah, D. A., & Dhiya'Syaifullah, M. (2024). Pendampingan Pengembangan Teknologi Digital untuk Meningkatkan Jangkauan Pemasaran Industri Tas Anyaman Desa Sukorejo, Ponorogo. *Khadimul Ummah*, 7(2), 1–10.
- Cakrawarta.com. (2024). Wujudkan Desa Digital, UNIDA Gelar Kerjasama Dengan Pemdes Nongkodono. *Cakrawarta*. Retrieved from <https://www.cakrawarta.com/wujudkan-desa-digital-unida-gelar-kerjasama-dengan-pemdes-nongkodono.html>
- Ditasman, D., & Amrullah, A. (2024). Kajian Literatur: Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digitalisasi. *Journal of Governance and Public Administration*, 1(3), 525–533.
- Dwimahendrawan, A., Rohim, R., & others. (2024). Digitalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Mewujudkan Smart Village. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(1), 1871–1879.
- Haris, R., & Sigit, A. A. (2023). *Analisis Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Jagung Di Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Indonesia, Ww. (2024). BerandaPonorogo Wujudkan Desa Digital, UNIDA Gelar Kerjasama Dengan Pemdes Nongkodono. *Warta Indonesia*. Retrieved from <https://www.wartaindonesianews.co.id/2024/09/wujudkan-desa-digital-unida-gelar.html>
- Jatim Prov. (2022). Desa Nongkodono, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. *Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa*.
- Lestari, I. D. (2023). *Strategi Komunikasi Kepala Desa Nongkodono Dalam Menggerakkan*

- Gotong Royong Masyarakat. IAIN PONOROGO.*
- Manalu, M., Rahayu, D., & Rahayu, N. (2024). E-Government Sebagai Basis Program Smart City di Kota Bengkulu. *Jurnal STIA Bengkulu: Committe to Administration for Education Quality*, 10(1), 85–96.
- Nugroho, O. C. (2016). Interaksi Simbolik dalam Komunikasi Budaya (Studi Analisis Fasilitas Publik di Kabupaten Ponorogo). *ARISTO*, 3(1), 1–18.
- Nusantara News. (2024). UNIDA Gandeng Pemdes Nongkodono Guna Realisasikan Desa Digital. *Nusantara News*. Retrieved from <https://nusantaranews.co/unida-gandeng-pemdes-nongkodono-guna-realisasikan-desa-digital/>
- Rahman, M. A., Hapsari, Y., & Pameli, A. (2024). Studi Literatur: Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 1(1), 20–26.
- Rahmayanti, R., & Hamdani, D. (2023). Pemanfaatan Digitalisasi Sistem Pelayanan Publik Bagi Peningkatan Efektivitas Organisasi. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 8916–8926.
- Salistia, F., Riyanto, R., Junaedi, D., & Amalia, R. S. (2023). Ekosistem SDM dan Inovasi Ekonomi Digital di Indonesia. *Sci-Tech Journal*, 2(1), 11–31.
- Undang-undang RI. (2014). *UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- World Bank. (2016). *World development report 2016: Digital dividends*. World Bank Publications.